



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR 10 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PETUNJUK PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN FORMASI JABATAN  
FUNGSIONAL RUMPUN PENGAWAS KUALITAS DAN KEAMANAN DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu upaya mengembangkan karier dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara dalam meningkatkan mutu pelaksanaan di Bidang Pengawas Kualitas dan Keamanan adalah melalui pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pembinaan dan Pelaksanaan Formasi Jabatan Fungsional Rumpun Pengawas Kualitas dan Keamanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 48 Tahun 2002 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dan Angka Kreditnya;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 128 Tahun 2002 tentang Jabatan Fungsional Penera dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 128 Tahun 2002 tentang Jabatan Fungsional Penera dan Angka Kreditnya;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 131 Tahun 2002 tentang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 131 tahun 2002 tentang Jabatan Fungsional Penguji Mutu barang dan Angka Kreditnya
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 150 tahun 2003 tentang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
  
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PETUNJUK PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL RUMPUN PENGAWAS KUALITAS DAN KEAMANAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
5. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional.
6. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan adalah Jabatan Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional pengawasan sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan.
8. Jabatan Fungsional Penera adalah Jabatan Fungsional yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengelolaan standar laboratorium, peneraulangan alat-alat takar dan timbang serta penyuluhan kemetrolagian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang adalah Jabatan Fungsional yang diberi tugas untuk memberi kepastian mutu barang lewat pengujian dan pengolahan laboratorium oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
10. Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor adalah Jabatan Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.

## **BAB II**

### **RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK, DAN BEBAN KERJA**

#### **Pasal 2**

Rumpun Jabatan, Kedudukan dan Tugas Pokok serta Beban Kerja dari Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Pengawas Farmasi dan Makanan, Penera, Penguji Mutu Barang dan Penguji Kendaraan Bermotor adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional.

**BAB III**  
**KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG**

**Pasal 3**

Kewajiban, Tanggung Jawab dan Wewenang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Pengawas Farmasi dan Makanan, Penera, Penguji Mutu Barang dan Penguji Kendaraan Bermotor adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional.

**BAB IV**  
**INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA**

**Pasal 4**

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Pengawas Farmasi dan Makanan, Penera, Penguji Mutu Barang dan Penguji Kendaraan Bermotor adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional dan khusus di Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk pembinaan administrasi kepegawaian adalah Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

**Pasal 5**

Tugas Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Pengawas Farmasi dan Makanan, Penera, Penguji Mutu Barang dan Penguji Kendaraan Bermotor adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional dan khusus di Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk tugas pembinaan administrasi kepegawaian adalah Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

**Pasal 6**

Untuk pembinaan administrasi kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai tugas memfasilitasi Diklat Penjurangan Jabatan Fungsional, pengangkatan, kenaikan, pembebasan sementara dan pemberhentian jabatan fungsional.

**BAB V**  
**UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN**

**Pasal 7**

Unsur dan Sub Unsur Kegiatan dari Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Pengawas Farmasi dan Makanan, Penera, Penguji Mutu Barang dan Penguji Kendaraan Bermotor adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional.

**BAB VI**  
**JENJANG JABATAN DAN PANGKAT**

**Pasal 8**

Jenjang Jabatan dan Pangkat dari Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Pengawas Farmasi dan Makanan, Penera, Penguji Mutu Barang dan Penguji Kendaraan Bermotor adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional.

**BAB VII**  
**RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI**

**Pasal 9**

Rincian Kegiatan dan Unsur yang dinilai Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Pengawas Farmasi dan Makanan, Penera, Penguji Mutu Barang dan Penguji Kendaraan Bermotor adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional.

**BAB VIII**  
**PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT**

**Pasal 10**

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Pengawas Farmasi dan Makanan, Penera, Penguji Mutu barang dan Penguji Kendaraan Bermotor adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional.

**BAB IX**  
**PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 11**

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Pengawas Farmasi dan Makanan, Penera, Penguji Mutu Barang dan Penguji Kendaraan Bermotor sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional adalah Bupati.

## **BAB X FORMASI JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 12**

Pengangkatan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Pengawas Farmasi dan Makanan, Penera, Penguji Mutu Barang dan Penguji Kendaraan Bermotor sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku sesuai dengan formasi yang ada pada masing-masing jabatan fungsional, daftar formasi sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB XI KENAIKAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, ALIH JENJANG DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA, PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN, PENERA, PENGUJI MUTU BARANG DAN PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR**

### **Pasal 13**

Pejabat yang berwenang menaikkan, membebaskan sementara, mengangkat kembali, mengalih jenjang dan memberhentikan dari Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Pengawas Farmasi dan Makanan, Penera, Penguji Mutu Barang dan Penguji Kendaraan Bermotor sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku sesuai dengan masing-masing jabatan fungsional adalah Bupati.

### **Pasal 14**

Kenaikan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, alih jenjang dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Pengawas Farmasi dan Makanan, Penera, Penguji Mutu Barang dan Penguji Kendaraan Bermotor harus sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku sesuai dengan masing-masing jabatan fungsional.

## **BAB XIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 016 Tahun 2008 tentang Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 12 Februari 2016

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

**TTD**

**ACHMAD FIKRY**

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 12 Februari 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

**TTD**

**M. IDEHAM**

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



**ZAINI FAHRI**  
NIP. 19690314 199503 1 002

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2016 NOMOR 11**

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
 NOMOR 10 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PETUNJUK PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN FORMASI JABATAN  
 FUNGSIONAL RUMPUN PENGAWAS KUALITAS DAN KEAMANAN DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

**DAFTAR FORMASI JABATAN FUNGSIONAL RUMPUN PENGAWAS KUALITAS DAN KEAMANAN  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

<b>NO</b>	<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>	<b>TUGAS POKOK</b>	<b>JENIS JABATAN</b>	<b>JENJANG JABATAN</b>	<b>PANGKAT/ GOL. RUANG</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Pengadaan Barang dan Jasa	Melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan, penyediaan manajemen kontrak dan manajemen informasi asset	Keahlian	Pertama Muda Madya	III/a – III/b III/c – III/d IV/a – IV/c	S I / D IV Sda Sda	
2.	Pengawas Farmasi dan Makanan	Melaksanakan pengawasan farmasi dan makanan yang meliputi penyiapan perangkat lunak untuk pengawasan dibidang farmasi dan makanan, pemeriksaan, pengujian dan penilaian	Keterampilan	Pelaksana Pelaksana Lanjutan Penyelia	II/b – II/c – II/d III/a – III/b III/c – III/d	D II Sda Sda	
			Keahlian	Pertama Muda Madya Utama	III/a-III/b III/c-III/d IV/a-IV/c IV/d-IV/e	S1 / D IV Sda Sda Sda	

3.	Penera	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan standar ukuran laboratorium serta pembinaan terhadap penggunaan satuan ukuran.</li> <li>- Peneraulangan serta pengujian alat-alat ukur takar timbang dan perlengkapan (UTTP)</li> <li>- Pengawasan alat-alat ukur, timbang dan perlengkapannya (UTTP) barang dalam keadaan terbungkus (BDKT)</li> <li>- Penyuluhan Kemetrolgion</li> </ul>	Keterampilan	Pelaksana Pelaksana Lanjutan Penyelia	II/b – II/c – II/d III/b – III/b III/c – III/d	D II Sda Sda	
			Keahlian	Pertama Muda Madya	III/a – III/b III/c – III/d IV/a – IV/c	S1 / D IV Sda Sda	
4.	Penguji Mutu Barang	Memberikan pemastian mutu barang, pengembangan penguji dan pengelolaan laboratorium penguji	Keterampilan	Pelaksana Pelaksana Lanjutan Penyelia	II/b – II/c – II/d III/b – III/b III/c – III/d	D II Sda Sda	
			Keahlian	Pertama Muda Madya	III/a – III/b III/c – III/d IV/a – IV/c	S1 / D IV Sda Sda	

5.	Penguji Kendaraan Bermotor	Melaksanakan pemastian kelayakan jalan kendaraan meliputi pengujian berkala kendaraan bermotor, pengujian tipe kendaraan bermotor, rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, perawatan serta perbaikan peralatan pengujian kendaraan bermotor	Keterampilan	Pelaksana Pemula Pelaksana Lanjutan Penyelia	II/a II/b – II/c – II/d III/a – III/b III/c – III/d	SLTA D II Sda Sda	
----	----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	----------------------------	--

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

**TTD**

**ACHMAD FIKRY**